

EVALUASI KINERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KABUPATEN PAKPAK BHARAT

"PERFORMANCE EVALUATION OF AGRICULTURAL EXTENSION CENTER (AEC) PAKPAK BHARAT"

Holong Hasugian^{*)}, Luhut Sihombing^{**)}, Salmiah^{**)}

- ^{*)} Alumni Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Departemen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara
Jl. Prof. A. Sofyan No. 3 Medan
Hp. 085360828447, E-mail: holongbybeh@yahoo.co.id
- ^{**)} Staff Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi dan kinerja balai penyuluhan pertanian di kabupaten pakpak barat .

Metode penentuan daerah penelitian ditentukan secara purposive (sengaja). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui instansi-instansi yang terkait seperti badan pusat statistik, kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikan dan Kehutanan (BP4K), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), sedangkan data primer diperoleh melalui daftar pertanyaan dan hasil wawancara langsung dengan sampel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kabupaten Pakpak Bharat berjalan dengan baik.
2. Tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah merencanakan dan melaksanakan program-program penyuluhan dalam hal informasi, teknologi, sarana produksi, pembiayaan, pasar, peningkatan tenaga penyuluh dan kelembagaan serta kemitraan pelaku usaha, membuat percontohan dan model usaha tani sesuai dengan peraturan yang berlaku, misi dan tujuan penyuluhan pertanian.
3. Kinerja balai penyuluhan kabupaten pakpak barat adalah tinggi dengan skor 26,76 dengan persentase 891,6.

Kata-kata kunci: evaluasi ,kinerja, balai penyuluhan pertanian.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the existence and performance of agricultural extension centers in the district Pakpak Bharat.

Method of determining the area of research is determined by purposive (deliberately). The data collected in this study consisted of secondary data and primary data . Secondary data was obtained through the relevant agencies such as the central statistical agency , the office of the Executive Agency for Agricultural Extension, Fisheries and Forestry (EAEFF) ,Agricultural Extension Center (AEC), while the primary data obtained through questionnaires and direct interviews with a sample. The conclusion of this study is:

- 1. Implementation of extension activities in Bharat Pakpak goes well.*
- 2. Duties and functions of Agricultural Extension Center (AEC) is to plan and implement education programs in terms of information, technology, production facilities, financing, market, and institutional improvement of extension workers as well as business partnerships, make and model of a pilot farm in accordance with the regulations applicable, the mission and purpose of agricultural extension.*
- 3. Performance hall extension pakpak bharat district is high with a score of 26.76 with a percentage of 891,6.*

Key words: *evaluation, performance, agricultural extension centers*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Upaya mewujudkan pembangunan pertanian tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi. Masalah pertama yaitu penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas, faktanya lahan dan pertanian kita sudah mengalami degradasi yang luar biasa, dari sisi kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk anorganik. Masalah kedua yang dialami saat ini adalah terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting namun minim ialah pembangunan dan pengembangan waduk. Masalah ketiga adalah adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Masalah keempat adalah muncul dari terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan. Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Masalah kelima adalah masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan (Anonimus, 2013 : <http://www.setkab.go.id/artikel>).

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada di masing-masing kecamatan kabupaten Pakpak Bharat dalam kurun waktu enam tahun sejak dibentuk, mengalami beberapa kendala dalam lembaga maupun dilapangan, yaitu kurangnya personil Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sesuai struktur organisasi yang ada, kurangnya tenaga penyuluh pertanian yang memiliki disiplin ilmu untuk mengembangkan potensi pertanian di kabupaten Pakpak Bharat, kurangnya pelaksanaan koordinasi yang menangani tentang keberhasilan pembangunan

pertanian, sarana dan prasarana yang dimiliki (peralatan kantor, kendaraan dinas, alat bantu/peraga penyuluh) belum memadai sesuai dengan jumlah dan jenis yang dibutuhkan. Sehingga, banyak program-program Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang tidak terlaksana sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Inilah yang mendasari saya untuk melakukan penelitian ini.

Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan masalah-masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Gambaran umum pelaksanaan penyuluhan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat ?
2. Apa saja tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat ?
3. Bagaimana kinerja dan eksistensi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat?
4. Bagaimana keberhasilan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat ?
5. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ?
6. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui gambaran umum pelaksanaan penyuluhan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat.
2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat.
3. Untuk mengetahui kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat?
4. Untuk mengetahui keberhasilan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat.
5. Untuk mengetahui -masalah apa saja yang dihadapi oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
6. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat.

TINJAUAN PUSTAKA

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan unit penunjang penyelenggaraan pertanian yang administrasi, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Berbagai kegiatan pokok dalam operasional, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus

berdasarkan ketetapan atau keputusan bupati/walikota. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian dibutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini aparat Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sarana prasarana, pendanaan serta status kedudukan lembaga yang kuat. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai sebuah lembaga yang dekat dengan masyarakat peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sangat besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan (Mokhtar, 2001).

Landasan Teori

Kinerja diberi batasan oleh Maier sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan tugas ataupun suatu pekerjaan (Moh, 1991). Lebih tegas lagi Yeremias mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil. Dalam pengertian yang sama, Atmosudirjo menyatakan bahwa kinerja adalah prestasi kerja dari penyelenggaraan sesuatu (Soebagjo, 1998).

Hipotesis Penelitian

1. Pelaksanaan penyuluhan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat ada yang tidak berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagian tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
3. Eksistensi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) diharapkan oleh petani di kabupaten Pakpak Bharat.
4. Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat sedang.
5. Ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah penelitian.
6. Ada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah penelitian.

METODE PENELITIAN

Metode Penentuan Daerah Sampel

Daerah penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu secara sengaja. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Pakpak Bharat dengan pertimbangan bahwa semua kecamatan mempunyai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel adalah secara *purposive* dengan *teknik random sampling*. Dimana yang akan menjadi sampel penelitian adalah kepala BP4K, dua orang PPL dari setiap BPP (setiap BPP satu orang PPL honorer dan satu orang PNS) dan satu orang ketua gapoktan di masing-masing kecamatan. Sehingga jumlah sampel penelitian seluruhnya berjumlah 25 orang.

Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait serta literature. Sedangkan data primer yang dibutuhkan diperoleh dari:

1. Kuisioner : data direkam dengan menggunakan kuisioner yang telah dibuat dan disebarikan kepada responden
2. Wawancara : dilakukan apabila jawaban yang diberikan oleh responden dalam kuisioner belum terungkap jelas sehingga perlu menggunakan wawancara lisan
3. Observasi : mengamati secara langsung bagaimana perilaku dan proses cara kerja penyuluh pertanian lapangan yang ada di delapan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten Pakpak Bharat dan mencatat kejadian – kejadian yang berlangsung selama proses tersebut berjalan.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh terlebih dahulu ditabulasi kemudian diolah secara manual lalu dijabarkan secara deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencatatan mengenai situasi – situasi atau kejadian yang terjadi. Dalam arti ini, penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata – mata dan tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, uji hipotesis atau mendapatkan makna dan implikasi dari penelitian tersebut (Wirartha, 2006; 155).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempunyai 8 fungsi pokok. Keberhasilan fungsi pokok BPP dianalisis dengan penetapan target. Target ditetapkan dengan menggunakan skor.

Untuk masalah 1, dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan tentang eksistensi Balai Penyuluhan Pertanian.

Untuk masalah 2, dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan tentang kinerja Balai Penyuluhan Pertanian.

Untuk masalah 3, dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan tentang fungsi pokok Balai Penyuluhan Pertanian.

Untuk masalah 4, dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan tentang masalah – masalah apa saja yang dihadapi dalam eksistensi Balai Penyuluhan Pertanian.

Untuk masalah 5, dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan tentang masalah – masalah apa saja yang dihadapi dalam kinerja Balai Penyuluhan Pertanian.

Untuk masalah 6, dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan tentang upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah – masalah yang dihadapi dalam eksistensi Balai Penyuluhan Pertanian.

Untuk masalah 7, dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan tentang upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah – masalah yang dihadapi dalam kinerja Balai Penyuluhan Pertanian.

Untuk masalah 3, dianalisis dengan skoring yaitu dengan melihat besarnya jumlah dari skoring kemudian dianalisis secara deskriptif dengan kriteria:

1. Jika pelaksanaan fungsi pokok Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sesuai dengan rekomendasi skor 3
2. Jika pelaksanaan fungsi pokok Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kurang sesuai dengan rekomendasi skor 2
3. Jika pelaksanaan fungsi pokok Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tidak sesuai dengan rekomendasi skor 1.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi dilihat dengan *range* parameter :

rendah adalah 0 – 9

sedang adalah 10 – 18

tinggi adalah 19 – 27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Penyuluhan

Gambaran umum pelaksanaan penyuluhan di kabupaten Pakpak Bharat dalam hal ini melalui pelayanan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di masing – masing kecamatan dijabarkan dari berbagai aspek diuraikan sebagai berikut.

Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh Pertanian

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan penyuluhan. Semakin mampu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk mengatasi masalah usaha tani masyarakat, maka semakin tingkat kepercayaan masyarakat juga akan semakin tinggi. Sampai pada hari ini, masyarakat Pakpak Bharat masih sangat percaya kepada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melihat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian yang sudah didapat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) . Dari semua tenaga penyuluh lapangan, 41 orang berpendidikan sarjana, selebihnya berpendidikan menengah atas. Penyuluh yang masih honorer berjumlah 30 orang dan selebihnya berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Kualitas Pelayanan kepada petani

Kualitas pelayanan maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh petugas penyuluhan untuk menyelesaikan masalah-masalah usaha tani masyarakat, baik melalui sarana, prasarana maupun dengan usaha lainnya yang bertujuan untuk kebaikan para petani. Kegiatan penyuluhan didukung oleh sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah diantaranya yaitu, jalan aspal ke setiap kecamatan sudah bagus, kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di setiap kecamatan beserta perlengkapan kantor, kendaraan roda dua berjumlah 66 unit diberikan kepada tenaga penyuluh lapangan, aula pertemuan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan di kecamatan Salak, posko penyuluhan sebanyak 52 unit, bangunan pengolahan pupuk cair di kecamatan Salak dan STTU Jehe yang bisa digunakan bersama.

Kesejahteraan Petani

Penyuluhan di kabupaten Pakpak Bharat membawa perubahan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya cara berusaha tani masyarakat. Pelayanan yang ada di masing-masing kecamatan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) membuat bantuan modal dari pemerintah sering didapat masyarakat untuk lebih meningkatkan pendapat melalui usaha tani yang lebih maju. Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, produktifitas padi sawah yang juga merupakan ikon bidang tanaman dan hortikultura kabupaten Pakpak Bharat, produktifitas tahun 2009 sebesar 6.451 ton. Pada tahun 2010 sebesar 11.229 ton. Pada tahun 2011 sebesar, 11.952 ton. Dari data tersebut dapat dilihat setiap tahun produktifitas padi di kabupaten Pakpak Bharat mengalami peningkatan yang pada akhirnya juga meningkatkan pendapatan petani Pakpak Bharat.

Tugas dan Fungsi BPP kabupaten Pakpak Bharat

Sesuai dengan undang – undang No. 16 Tahun 2006 pasal 15 ayat 1, setiap Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kabupaten Pakpak Bharat mempunyai tugas sebagai berikut.

- Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten / kota, Program penyuluhan maksudnya adalah garis-garis besar kegiatan penyuluhan yang akan disusun menjadi program penyuluhan.

- Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) harus berlandaskan program penyuluhan yang disusun oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang harus sejalan dengan program penyuluhan kabupaten Pakpak Bharat.
- Menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Permasalahan dalam setiap usaha tani masyarakat akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan cara berusaha tani. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) harus mampu sebagai fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Padi sawah sebagai komoditi utama pertanian kabupaten Pakpak Bharat membutuhkan manajemen yang harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan cara budidayanya, mulai dari persiapan dan budidaya, panen dan penanganan sesudah panen sehingga akan terwujudnya modifikasi, adopsi dan inovasi teknologi tepat guna baik penemuan masyarakat lokal Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur dan pelaku agribisnis dilakukan dengan melalui pendidikan formal dan pelatihan formal/informal. Kerjasama dengan lembaga-lembaga ataupun perguruan tinggi dijalin menyangkut penelitian dan pendidikan dengan kampus atau universitas dan lembaga-lembaga penelitian, keuangan dengan perbankan, pengolahan dan pemasaran dengan lembaga pemasaran atau perusahaan makanan, serta informasi agribisnis dengan media massa. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dilakukan melalui program magang, studi banding, pelatihan, seminar, maupun disekolahkan dengan anggaran dari pemerintah daerah maupun program dari pemerintah pusat.

- Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Tabel 1. Realisasi tugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kabupaten Pakpak Bharat.

No.	Tugas (UU No. 16 Tahun 2006)	Realisasi
1	Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota	Terlaksana
3	Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan Menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar	Terlaksana
4	Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha	Terlaksana
5	Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan	Terlaksana
6	Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha	Terlaksana Kurang terlaksana karena masih ada tenaga penyuluh yang masih harus ditingkatkan kapasitas pengetahuannya.

Sumber: data primer

Fungsi pokok BPP akan diuraikan sebagai berikut.

- Pengenalan kebutuhan petani.
Sangat tanggap dan peka dalam mengakomodir aspirasi dan mengenali kebutuhan petani. Sesuainya aspek responsivitas diindikasikan dengan kemampuan para penyuluh dalam mengidentifikasi aspirasi kebutuhan petani dan penyusunan rencana kerja yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan petani.
- Kemampuan penentuan prioritas pelayanan.
Beragamnya kebutuhan petani menuntut penyuluh harus jeli dan peka terhadap kebutuhan yang memang merupakan prioritas untuk dipenuhi. Pemrioritasan kebutuhan dilakukan dengan menyusun berdasarkan kemampuan untuk mengatasi permasalahan dan pemilahan terhadap kebutuhan yang memerlukan upaya tidak lanjut dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
- Pengembangan program-program penyuluhan yang sesuai kebutuhan dan aspirasi petani.
Kemampuan para penyuluh dalam mengidentifikasi aspirasi kebutuhan petani dan penyusunan rencana kerja yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan petani
- Kesesuaian kegiatan dengan misi dan tujuan penyuluhan pertanian.
Upaya untuk mendukung semua program kegiatan penyuluhan diperlukan adanya peran aktif masyarakat dan peran pemerintah kabupaten Pakpak Bharat untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat yang sesuai dengan visi misi kabupaten terutama yang berkaitan dengan alih teknologi yang saat ini semakin canggih dan pembinaan yang berkelanjutan sesuai tujuan penyuluhan pertanian agar petani menjadi sejahtera.
- Sesuai antara prioritas pelayanan dan pemecahan masalah dengan kebutuhan masyarakat petani.
Pada pelaksanaan kegiatannya, kinerja Balai Penyuluhan Pertanian tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep – konsep teoritis, tetapi juga memberikan peluang dan kesempatan serta bimbingan kepada petani untuk mencoba informasi dan teknologi yang berkembang sehingga mereka memperoleh pengalaman kegiatan secara nyata (belajar sambil bekerja) yang sangat bermanfaat bagi petani.
- Kesesuaian tugas dan fungsi dengan peraturan yang ada.
Penyuluh harus dapat menyusun rencana kerja yang tepat yang dapat mewakili kepentingan petani dan yang tidak mengabaikan program pemerintah. Perlu rencana kerja penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang dapat mencerminkan dan menjawab permasalahan yang ada di tingkat petani dan disesuaikan dengan program pemerintah dengan tidak mengabaikan pula rencana kerja yang sesuai dengan potensi sumberdaya daerah binaannya.
- Kinerja pelayanan dan informasi.
Kualitas pelayanan penyuluhan kepada petani harus diutamakan. Pelaksanaan latihan dan kunjungan harus optimal seperti materi dan metode yang digunakan berada pada kategori tepat dan layanan yang cukup. Keadaan ini harus dipertahankan agar respon masyarakat terhadap kegiatan dan program penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dapat terlaksana dengan baik karena pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan bagi petani dan akan menumbuhkan sikap yang positif terhadap segala kegiatan penyuluhan.

- Kecepatan dalam pemberian pelayanan kepada petani.
Salah satu cara untuk mengantisipasi munculnya kondisi ketidaktuntasan layanan penyuluhan dapat dilakukan dengan optimalisasi kinerja BPP melalui perbaikan atau peningkatan kualitas layanan.
- Ketepatan materi dan teknik pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian.
Peningkatan aspek indikator kualitas layanan ini didasari oleh penyuluh sebagai abdimasyarakat yang membantu petani dan keluarganya serta lingkungannya untuk lebih sejahtera, memberikan kemudahan dan menjadi jembatan penghubung antara lembaga pemerintah dengan petani agar instansi/lembaga terkait dapat memberikan bantuan, bimbingan, maupun pinjaman bagi keberhasilan petani dan usahatani.

Kinerja BPP Kabupaten Pakpak Bharat

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kabupaten didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang lumayan baik seperti jalan aspal keseluruhan kecamatan dan kendaraan bagi tenaga penyuluh. Keberhasilan BPP di kabupaten Pakpak Bharat dalam pelaksanaan fungsi pokoknya (untuk menjawab identifikasi masalah 3) dapat dilihat dari hasil penelitian terhadap 25 orang sampel.

Tabel 2. Skor dan persentase ketercapaian pelaksanaan fungsi pokok BPP di kabupaten Pakpak Bharat

No	Fungsi Pokok BPP	Skor yang diperoleh	Persentase (%)
1	Pengenalan kebutuhan petani	2,96	98,6
2	Kemampuan penentuan prioritas pelayanan	3	100
3	pengembangan program-program penyuluhan yang sesuai kebutuhan dan aspirasi petani	2,96	98,6
4	Kesesuaian kegiatan dengan misi dan tujuan penyuluhan pertanian	2,96	98,6
5	Sesuai antara prioritas pelayanan dan pemecahan masalah dengan kebutuhan masyarakat petani	2,96	98,6
6	Kesesuaian tugas dan fungsi dengan peraturan yang ada	3	100
7	Kinerja pelayanan dan informasi	3	100
8	Kecepatan dalam pemberian pelayanan kepada petani	2,96	98,6
9	ketepatan materi dan teknik pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian	2,96	98,6
Total		26,76	891,6

Sumber: data primer

Dari tabel 2 ada tiga fungsi pokok yang persentasenya 100% yaitu :

- a. Kemampuan penentuan prioritas pelayanan dimana BPP sanggup membuat skala prioritas penanganan permasalahan usaha tani masyarakat Pakpak Bharat melalui pelayanan yang benar-benar dibutuhkan petani.
- b. Kesesuaian tugas dan fungsi dengan peraturan yang ada.
Tugas dan fungsi benar-benar dipahami oleh semua tenaga penyuluh dimasing-masing Balai Penyuluhan Pertanian di setiap kecamatan yang diturunkan oleh pemerintah pusat. Amanah dari undang-undang disetiap tugas dan fungsi dilaksanakan untuk kemakmuran keluarga petani dan tujuan akhirnya adalah kemajuan pertanian kabupaten Pakpak Bharat.
- c. Kinerja pelayanan dan informasi.
Masyarakat Pakpak Bharat merasa puas dengan pelayanan yang cepat untuk masalah usaha tani mereka dengan informasi yang sangat dibutuhkan. Hal ini membuat Balai Penyuluhan Pertanian di kabupaten Pakpak Bharat sangat dibutuhkan masyarakat.

Pencapaian BPP kabupaten Pakpak Bharat

Dalam kurun waktu 5 tahun, BPP di setiap kecamatan telah menunjukkan prestasi atau pencapaian dalam kegiatan penyuluhan terutama membantu meningkatkan pendapat masyarakat petani. Pencapaian itu diantaranya adalah meningkatnya kelembagaan petani, meningkatnya kelas kelompok tani, meningkatnya kesejahteraan petani, dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian lapangan (PPL). Lebih jelasnya digambarkan dalam lampiran 5.

Masalah – masalah yang dihadapi oleh BPP kabupaten Pakpak Bharat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan

Dalam pelaksanaan sehari – hari, PPL dari masing – masing BPP sering mendapat berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Beberapa masalah yang dihadapi PPL di lapangan yaitu sebagai berikut.

1. Belum semuanya SDM dan disiplin petugas penyuluhan sesuai standar.
Penyuluh pertanian lapangan (PPL) masih belum terpenuhi sesuai dengan bidang teknis yang dibutuhkan dilapangan karena umumnya tenaga penyuluh berasal dari konsentrasi ilmu bidang pertanian penyuluh yang ada sekarang masih polyvalen).
2. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga masih relatife lemah.
Tingkat pelaksanaan hubungan antar lembaga yang menangani keberhasilan pembangunan pertanian masih belum optimal. Misalnya hubungan antar balai penyuluhan pertanian (BPP), antar kelompok tani, dan antar gabungan kelompok tani (Gapoktan) di kabupaten Pakpak Bharat.
3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan di masing - masing balai penyuluhan pertanian (BPP) masih belum memadai.
Sarana dan prasarana yang dimiliki (kantor dan perlengkapannya, kendaraan, alat bantu/peraga penyuluhan) belum sesuai dengan jumlah dan jenis yang dibutuhkan.
4. Penyuluh pertanian lapangan (PPL) masih kurang percaya diri dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, karena penyuluh pertanian lapangan (PPL) dituntut menyuluh dalam segala hal seperti tentang perikanan, peternakan, kehutanan, dll. Sementara latar belakang pendidikan PPL hanya dari pertanian saja.

5. Pola pemikiran petani yang masih kaku membuat program penyuluhan tidak maksimal karena system pertanian yang turun-temurun masih dianut.

Upaya – upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi oleh BPP kabupaten Pakpak Bharat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan

1. Memanfaatkan anggaran yang tepat sasaran untuk meningkatkan frekuensi pelatihan, studi banding/magang bagi penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan pelaku agribisnis.
2. Memperbanyak pertemuan antar lembaga pertanian.
3. Untuk melakukan penyuluhan yang memerlukan alat, butuh kerja sama dengan balai penyuluhan pertanian (BPP) lain demi kelancaran kegiatan penyuluhan.
4. Penyuluh pertanian lapangan (PPL) membuat demplot atau lahan percobaan dan optimalisasi pemanfaatan lahan – lahan potensial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara umum, pelaksanaan penyuluhan di kabupaten Pakpak Bharat berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dengan pencapaian yang sudah didapat.
2. Sesuai dengan undang – undang No. 16 Tahun 2006 pasal 15 ayat (1), tugas BPP yaitu:
 - Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten / kota,
 - Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan,
 - Menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar,
 - Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha,
 - Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan, dan
 - Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Fungsi pokok BPP adalah:

- Pengenalan kebutuhan petani
 - Kemampuan penentuan prioritas pelayanan
 - pengembangan program-program penyuluhan yang sesuai kebutuhan dan aspirasi petani
 - Kesesuaian kegiatan dengan misi dan tujuan penyuluhan pertanian
 - Sesuai antara prioritas pelayanan dan pemecahan masalah dengan kebutuhan masyarakat petani
 - Kesesuaian tugas dan fungsi dengan peraturan yang ada
 - Kinerja pelayanan dan informasi
 - Kecepatan dalam pemberian pelayanan kepada petani
 - Ketepatan materi dan teknik pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian.
3. Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan dengan metode skoring, kinerja BPP di kabupaten Pakpak Bharat adalah tinggi dengan skor 26,76 dengan persentase 89,6
 4. Masalah – masalah yang dihadapi BPP di kabupaten Pakpak Bharat adalah:
 - Belum semuanya SDM dan disiplin petugas penyuluhan sesuai standar.

- Pelaksanaan koordinasi antar lembaga masih relatife lemah
 - Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan di masing - masing BPP masih belum memadai
 - PPL masih kurang percaya diri dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, karena PPL dituntut menyuluh dalam segala hal seperti tentang perikanan, peternakan, kehutanan, dll. Sementara latar belakang pendidikan PPL hanya dari pertanian saja.
 - Pola pemikiran sebagian petani yang masih kaku membuat program penyuluhan tidak maksimal karena system pertanian yang turun-temurun masih dianut.
5. Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah – masalah yang dihadapi BPP di kabupaten Pakpak Bharat :
- Memanfaatkan anggaran yang tepat sasaran untuk meningkatkan frekuensi pelatihan, studi banding/magang bagi PPL dan pelaku agribisnis.
 - Memperbanyak pertemuan antar lembaga pertanian.
 - Untuk melakukan penyuluhan yang memerlukan alat, butuh kerja sama dengan BPP lain demi kelancaran kegiatan penyuluhan.
 - PPL membuat demplot atau lahan percobaan dan optimalisasi pemanfaatan lahan – lahan potensial.

Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah
Peraturan harus benar – benar melindungi petugas penyuluhan dan masyarakat Pakpak Bharat.
2. Kepada PPL
Tetap semangat dan jangan pernah menyerah memajukan pertanian kabupaten Pakpak Bharat.
3. Kepada Petani
Cara bertani pada masa dulu, kurang tepat diteruskan masa sekarang.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya.
Sebaiknya penelitian lanjutan mengenai peran PPL dalam memodernisasi pertanian kabupaten Pakpak Bharat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, 2013 : <http://www.setkab.go.id/artikel>. (Diakses pada 17 Mei 2013 pukul 22.15 WIB)
- Mokhtar, M.S. 2001. *Kinerja lembaga penyuluhan dan adopsi inovasi kedelai serta implikasinya pada pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kota waringin Timur*. Tesis Program PascaSarjana UGM. Program Studi Ekonomi Pertanian. Yogyakarta.
- Soebagjo. 1998. *Kinerja Dispenda Tk. II dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah*. Tesis Program Pascasarjana UGM. Yogyakarta.